



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN

NOMOR : W12- 47.PR.01.03 Tahun 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TAMBAHAN
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BANTEN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA BANTEN

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi penilaian akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2019, perlu dilakukan turunan atas Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang berlaku di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik

- Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TAMBAHAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Tambahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten yang selanjutnya disebut IKU dan IKU Tambahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten.
- KEDUA : IKU dan IKU Tambahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, untuk menyempurnakan dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT : IKU dan IKU Tambahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten disusun dengan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound).

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 30 Maret 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH

AGUS TOYIB
NIP. 196306171985031002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
 MANUSIA BANTEN
 NOMOR : W12- 47.PR.01.03
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
 LINGKUNGAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM
 DAN HAM BANTEN

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	Survei Internal Kantor Wilayah	Kepala Divisi Administrasi	Kepala Kantor Wilayah
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Penilaian Ditjen AHU (Realisasi PNBP AHU Tahun 2021 /Target PNBP AHU Tahun 2021) X 100%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Kepala Kantor Wilayah
Meningkatnya Efektifitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase Penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	Penilaian Ditjen AHU (Realisasi Penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris Tahun 2021/Target Penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris Tahun 2021) X 100%		

<p>Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah</p> <p>2. Jumlah pelaksanaan deseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah</p>	<p>Penilaian Ditjen KI (Realisasi permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah Tahun 2021 / Target permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah Tahun 2021) X 100%</p> <p>Penilaian Ditjen KI (Realisasi pelaksanaan deseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah Tahun 2021 / Target pelaksanaan deseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah Tahun 2021) X 100%</p>	<p>Kepala Divisi Pelayanan Hukum</p>	<p>Kepala Kantor Wilayah</p>
<p>Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal</p>	<p>1. Persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual</p> <p>2. Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah</p> <p>3. Kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah</p>	<p>Penilaian Ditjen KI (Realisasi penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual Tahun 2021 / Target penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual Tahun 2021) X 100%</p> <p>Penilaian Ditjen KI (Realisasi pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Tahun 2021 / Target pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Tahun 2021) X 100%</p> <p>Penilaian Ditjen KI (Realisasi kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah Tahun 2021 / Target kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah Tahun 2021) X 100%</p>	<p>Kepala Divisi Pelayanan Hukum</p>	<p>Kepala Kantor Wilayah</p>

<p>Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah</p> <p>Terselenggaranya pembinaan perancangan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham</p> <p>Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan</p>	<p>Penilaian Ditjen Peraturan Perundang-undangan (Realisasi rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Tahun 2021 / Target rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Tahun 2021) X 100%</p> <p>Penilaian Ditjen Peraturan Perundang-undangan (Realisasi peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan Tahun 2021 / Target peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan tahun 2021) X 100%</p>	<p>Kepala Divisi Pelayanan Hukum</p>	<p>Kepala Kantor Wilayah</p>
<p>Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM</p>	<p>1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM</p> <p>2. Jumlah Kab/Kota peduli HAM</p> <p>3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM</p>	<p>Penilaian Ditjen HAM (Realisasi pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM Tahun 2021 / Target pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM Tahun 2021) X 100%</p> <p>Penilaian Ditjen HAM (Realisasi Kab/Kota peduli HAM Tahun 2021 / Target Kab/Kota peduli HAM Tahun 2021) X 100%</p> <p>Penilaian Ditjen HAM (Realisasi instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM Tahun 2021 / Target instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM Tahun 2021) X 100%</p>	<p>Kepala Divisi Pelayanan Hukum</p>	<p>Kepala Kantor Wilayah</p>
<p>Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah</p>	<p>Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah</p>	<p>Penilaian Ditjen HAM (Realisasi tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah Tahun 2021 / Target tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah Tahun 2021) X 100%</p>	<p>Kepala Divisi Pelayanan Hukum</p>	<p>Kepala Kantor Wilayah</p>

Terselenggaranya Pembinaan Hukum di Wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	Penilaian BPHN (Realisasi kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah Tahun 2021 / Target kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah Tahun 2021) X 100%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Kepala Kantor Wilayah
Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	<p>1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>2. Persentase permohonan bantuan hukum non-litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum</p> <p>4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah</p> <p>5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif</p>	<p>Penilaian BPHN (Realisasi permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan Tahun 2021 / Target permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan Tahun 2021) X 100%</p> <p>Penilaian BPHN (Realisasi permohonan bantuan hukum non-litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan Tahun 2021 / Target permohonan bantuan hukum non-litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan Tahun 2021) X 100%</p> <p>Survei Internal Balitbangkumham</p> <p>Penilaian BPHN (Realisasi desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah Tahun 2021 / Target desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah Tahun 2021) X 100%</p> <p>Penilaian BPHN (Realisasi anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif Tahun 2021 / Target anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif Tahun 2021) X 100%</p>	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Kepala Kantor Wilayah

<p>Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia</p>	<p>Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia</p> <p>Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah</p>	<p>Penilaian Balitbang (Realisasi rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia Tahun 2021 / Target rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia Tahun 2021) X 100%</p> <p>Penilaian Balitbang (Realisasi penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah Tahun 2021 / Target penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah Tahun 2021) X 100%</p>	<p>Kepala Divisi Pelayanan Hukum</p>	<p>Kepala Kantor Wilayah</p>
<p>Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah</p>	<p>Indeks Penyelenggaraan masyarakat di wilayah</p>	<p>Survei Internal Balitbangkumham (IPK & IKM UPT PAS)</p>	<p>Kepala Divisi Masyarakat</p>	<p>Kepala Kantor Wilayah</p>
<p>Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar</p>	<p>1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying</p> <p>2. Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum</p> <p>3. Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum</p>	<p>Penilaian Ditjen Masyarakat (Realisasi menurunnya tahanan yang overstaying Tahun 2021 / Target menurunnya tahanan yang overstaying Tahun 2021) X 100%</p> <p>Penilaian Ditjen Masyarakat (Realisasi tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum Tahun 2021 / Target tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum Tahun 2021) X 100%</p> <p>Penilaian Ditjen Masyarakat (Realisasi tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum Tahun 2021 / Target tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum Tahun 2021) X 100%</p>	<p>Kepala Divisi Masyarakat</p>	<p>Kepala Kantor Wilayah</p>

<p>Meningkatnya pelayanan pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar</p>	<p>1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya</p> <p>2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang bekekuatan hukum tetap</p>	<p>Penilaian Ditjen Pemasarakatan (Realisasi benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya Tahun 2021 / Target benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya Tahun 2021) X 100%</p> <p>Penilaian Ditjen Pemasarakatan (Realisasi benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang bekekuatan hukum tetap Tahun / Target benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang bekekuatan hukum tetap Tahun 2021) X 100%</p>	<p>Kepala Divisi Pemasarakatan</p>	<p>Kepala Kantor Wilayah</p>
<p>Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan, dan penanganan narapidanan resiko tinggi</p>	<p>1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian</p> <p>2. Persentase narapidana yang mendapatkan remisi</p> <p>3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi</p> <p>4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan</p>	<p>Penilaian Ditjen Pemasarakatan (Realisasi narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian Tahun 2021 / Target narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian Tahun 2021) X 100%</p> <p>Penilaian Ditjen Pemasarakatan (Realisasi narapidana yang mendapatkan remisi Tahun 2021 / Target narapidana yang mendapatkan remisi Tahun 2021) X 100%</p> <p>Penilaian Ditjen Pemasarakatan (Realisasi narapidana yang mendapatkan hak integrasi Tahun 2021 / Target narapidana yang mendapatkan hak integrasi Tahun 2021) X 100%</p> <p>Penilaian Ditjen Pemasarakatan (Realisasi narapidana yang mendapatkan hak pendidikan Tahun 2021 / Target narapidana yang mendapatkan hak pendidikan tahun 2021) X 100%</p>	<p>Kepala Divisi Pemasarakatan</p>	<p>Kepala Kantor Wilayah</p>

	<p>5. Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin</p> <p>6. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi</p> <p>7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif</p>	<p>Penilaian Ditjen Pemasyarakatan (Realisasi narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin Tahun 2021 / Target narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin Tahun 2021) X 100%</p> <p>Penilaian Ditjen Pemasyarakatan (Realisasi narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi Tahun 2021 / Target narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi tahun 2021) X 100%</p> <p>Penilaian Ditjen Pemasyarakatan (Realisasi narapidana yang bekerja dan produktif Tahun 2021 / Target narapidana yang bekerja dan produktif Tahun 2021) X 100%</p>		
<p>Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar</p>	<p>1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga</p> <p>2. Persentase anak yang mendapatkan putusan pidana penjara</p> <p>3. Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya</p>	<p>Penilaian Ditjen Pemasyarakatan (Realisasi klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga Tahun 2021 / Target klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga Tahun 2021) X 100%</p> <p>Penilaian Ditjen Pemasyarakatan (Realisasi anak yang mendapatkan putusan pidana penjara Tahun 2021 / Target anak yang mendapatkan putusan pidana penjara Tahun 2021) X 100%</p> <p>Penilaian Ditjen Pemasyarakatan (Realisasi klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya Tahun 2021 / Target klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya Tahun 2021) X 100%</p>	<p>Kepala Divisi Pemasyarakatan</p>	<p>Kepala Kantor Wilayah</p>

<p>Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuaistandar</p>	<p>1. Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat</p> <p>2. Persentase anak yang memperoleh hak integrasi</p> <p>3. Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar</p> <p>4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal</p>	<p>Penilaian Ditjen Pemasarakatan (Realisasi anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat Tahun 2021 / Target anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat Tahun 2021) X 100%</p> <p>Penilaian Ditjen Pemasarakatan (Realsiasi anak yang yang memperoleh hak integrase Tahun 2021 / Target anak yang yang memperoleh hak integrasi Tahun 2021) X 100%</p> <p>Penilaian Ditjen Pemasarakatan (Realisasi anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar Tahun 2021 / Target anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar Tahun 2021) X 100%</p> <p>Penilaian Ditjen Pemasarakatan (Realisasi anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal Tahun 2021 / Target anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal Tahun 2021) X 100%</p>	<p>Kepala Divisi Pemasarakatan</p>	<p>Kepala Kantor Wilayah</p>
<p>Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar</p>	<p>1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar</p> <p>2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah</p> <p>3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan / narapidana / anak pelaku gangguan kamtib</p>	<p>Penilaian Ditjen Pemasarakatan (Realisasi pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar Tahun 2021 / Target pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar Tahun 2021) X 100%</p> <p>Penilaian Ditjen Pemasarakatan (Realsasi gangguan kamtib yang dapat dicegah Tahun 2021 / Target gangguan kamtib yang dapat dicegah Tahun 2021) X 100%</p> <p>Penilaian Ditjen Pemasarakatan (Realsasi kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan / narapidana / anak pelaku gangguan kamtib Tahun 2021 / Target kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan / narapidana / anak pelaku gangguan kamtib Tahun 2021) X 100%</p>	<p>Kepala Divisi Pemasarakatan</p>	<p>Kepala Kantor Wilayah</p>

	4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	Penilaian Ditjen Pemasarakatan (Realisasi pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas Tahun 2021 / Target pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas Tahun 2021) X 100%		
Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana / tahanan / anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	<p>1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan / narapidana / anak sesuai dengan standar</p> <p>2. Persentase tahanan / narapidana / anak mendapatkan layanan kesehatan (prefentif) secara berkualitas</p> <p>3. Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses kesehatan layanan maternal</p> <p>4. Persentase tahanan / narapidana / anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani</p> <p>5. Persentase tahanan / narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p>	<p>Penilaian Ditjen Pemasarakatan (Realsasi pemenuhan layanan makanan bagi tahanan / narapidana / anak sesuai dengan standar Tahun 2021 / Target pemenuhan layanan makanan bagi tahanan / narapidana / anak sesuai dengan standar Tahun 2021) X 100%</p> <p>Penilaian Ditjen Pemasarakatan (Realisasi tahanan / narapidana / anak mendapatkan layanan kesehatan (prefentif) secara berkualitas Tahun 2021 / Target tahanan / narapidana / anak mendapatkan layanan kesehatan (prefentif) secara berkualitas Tahun 2021) X 100%</p> <p>Penilaian Ditjen Pemasarakatan (Realisasi tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses kesehatan layanan maternal Tahun 2021 / Target tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses kesehatan layanan maternal Tahun 2021) X 100%</p> <p>Penilaian Ditjen Pemasarakatan (Realisasi tahanan / narapidana / anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani Tahun 2021 / Target tahanan / narapidana / anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani Tahun 2021) X 100%</p> <p>Penilaian Ditjen Pemasarakatan (Realisasi tahanan / narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Tahun 2021 / Target tahanan / narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Tahun 2021) X 100%</p>	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah

	<p>6. Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV – AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)</p> <p>8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu / penyalahgunaan / korban penyalahgunaan narkotika</p>	<p>Penilaian Ditjen Pemasarakatan (Realisasi tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Tahun 2021 / Target tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Tahun 2021) X 100%</p> <p>Penilaian Ditjen Pemasarakatan (Realsasi keberhasilan penanganan penyakit menular HIV – AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh) Tahun 2021 / Target keberhasilan penanganan penyakit menular HIV – AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh) Tahun 2021) X 100%</p> <p>Penilaian Ditjen Pemasarakatan (Realisasi perubahan kualitas hidup pecandu / penyalahgunaan / korban penyalahgunaan narkotika Tahun 2021 / Target perubahan kualitas hidup pecandu / penyalahgunaan / korban penyalahgunaan narkotika Tahun 2021</p>		
Meningkatnya kualitas layanan pemsarakatan dan kapasitas hunian	Jumlah UPT pembangunan lembaga pemsarakatan (Lapas)	Penilaian Ditjen Pemasarakatan (Realisasi jumlah UPT pembangunan lembaga pemsarakatan (Lapas) Tahun 2021 / Target Jumlah UPT pembangunan lembaga pemsarakatan (Lapas) Tahun 2021) X 100%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	<p>1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah</p> <p>2. Indeks kepuasan internal di wilayah</p> <p>3. Indeks pengamanan keimigrasian di wilayah</p>	<p>Survei Internal Balitbangkumham</p> <p>Survei Internal Balitbangkumham</p> <p>Survei Internal Balitbangkumham</p>	Kepala Divisi Keimigrasian	Kepala Kantor Wilayah

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	KETERANGAN/ PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
Nilai Reformasi Birokrasi	Persentase satuan kerja yang membangun Zona Integritas dengan mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi sehingga diusulkan mendapatkan predikat WBK oleh TPI	Jumlah unit kerja yang memperoleh IPK minimal 13.5, minimal IKM 16, dan TLHP minimal 5	TIM Kerja Pembangunan ZI	Kepala Divisi Administrasi



KEPALA KANTOR WILAYAH

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agus Toyib', written over a horizontal line.

AGUS TOYIB
NIP. 196306171985031002